

Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017

Debby Islami (1) Lilik Rahmawati (2)
UIN Sunan Ampel Surabaya | islamidebbysj@gmail.com

Abstrak: Pajak daerah merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh setiap masyarakat sebagai bentuk kontribusi kepada daerah yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang. Adanya otonomi daerah memaksa setiap daerah untuk berinovasi dalam menghasilkan pendapatan daerahnya sendiri dengan melakukan penggalan terhadap sumber-sumber pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah. Berdasarkan hasil penelitian, pajak merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah yang memiliki kontribusi besar, diantaranya adalah pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Sektor pajak merupakan sektor yang sangat memengaruhi kondisi keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena digunakan untuk mengelola dan mengatur perekonomian Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menjelaskan bagaimana kontribusi dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur. Penerimaan dari dana Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan baik dalam pembangunan fisik maupun non fisik di Provinsi Jawa Timur. Perwujudan otonomi daerah di Provinsi Jawa Timur sudah efektif dapat dilihat dengan keberhasilan dalam menggali sumber-sumber dana dan pembangunan daerah.

Keywords: kontribusi; pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor; pendapatan asli daerah.

Pendahuluan

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan seluruh pendapatan yang diperoleh suatu daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹ Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena dapat melihat sejauh mana daerah tersebut dapat membiayai kegiatan dan pembangunan daerah itu sendiri sesuai dengan otonomi daerah. Pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk orientasi terhadap pembangunan. Otonomi daerah merupakan hak dimana daerah wajib untuk turut serta melancarkan jalannya pembangunan yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.² Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan asli daerah lain-lain yang sah. Pendapatan Asli Daerah juga bersumber dari dana perimbangan yang berasal dari APBN dan pinjaman daerah. Pemerintah daerah harus beradaptasi dan berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor, sehingga sektor-sektor tersebut memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber

¹ Ahmad Yani, "Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2002) Hlm. 51

² Azhari Aziz Samudra, "Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah" (Jakarta: Rajawali Pers. 2015) Hlm. 30-31

Pendapatan Asli Daerah dan menciptakan kemandirian daerah. Sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali dan dimanfaatkan secara maksimal dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.³

Pajak daerah merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi untuk terus digali. Daerah sangat membutuhkan pajak untuk memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat berupa belanja pemerintah, belanja pendidikan, anggaran kesehatan, anggaran infrastruktur, dan lain-lain. Menyadari betapa krusialnya pajak daerah untuk membiayai kebutuhan daerah yang sangat besar dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, maka kesadaran masyarakat akan pajak harus selalu ditingkatkan.

Ada dua jenis pajak daerah yang memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur, yakni pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, sedangkan bea balik nama kendaraan bermotor dikenakan atas pergantian kepemilikan kendaraan bermotor yang terjadi sebagai akibat dari adanya kegiatan jual beli, tukar menukar, hadiah, maupun hibah. Keduanya dipungut oleh masing-masing kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur oleh Dinas Pendapatan Daerah untuk kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur dan dilakukan bagi hasil untuk kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 serta Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/158/KPTS/013/2016. Kontribusi yang baik dari kedua jenis pajak tersebut mampu menjadikan Provinsi Jawa Timur

³ Ronald Bua Toding, "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya" 4 No. 1 tahun 2016 Hlm. 2

mandiri dengan mengelola keuangannya sendiri dengan baik tanpa harus menunggu bantuan dan transfer dari pemerintah pusat. Kemandirian yang dimaksud dalam hal ini adalah mandiri dalam melakukan perencanaan maupun pengelolaan sumber-sumber keuangan daerah. Semakin tingginya tingkat kemandirian suatu provinsi, maka akan semakin kuat ketahanan ekonomi daerah tersebut dalam menghadapi gejolak perekonomian nasional maupun internasional, seperti pengeluaran pemerintah, kelemahan ekonomi pasar, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah.⁴

Landasan Teori

Pajak memiliki peran yang strategis untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan dikelola untuk dipergunakan kembali guna memenuhi kebutuhan daerah.⁵ Pada hakikatnya, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi maupun badan yang sifatnya memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak menerima imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah dan mewujudkan kemakmuran masyarakat setempat. Pajak daerah juga merupakan wujud nyata dari pemenuhan hak untuk setiap daerah sehingga dapat melaksanakan otonomi daerahnya sendiri secara mandiri dengan melakukan penggalan sumber-sumber pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan peranan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan fasilitas yang lebih baik dalam

⁴ Rahardjo Adisasmita, "Pembiayaan Pembangunan Daerah" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011) Hlm. 8

⁵ Theresia Woro Damayanti dan Supramono, "Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan" (Yogyakarta: Andi, 2005) Hlm. 2

otonomi daerahnya sendiri. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah itu sendiri yang lebih mengerti kondisi dan keadaan daerahnya masing-masing, sehingga dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran telah dimaksimalkan untuk sepenuhnya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berasal dari data primer dan data sekunder, diantaranya adalah data target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta data Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur yang telah direalisasikan. Data primer didapatkan penulis melalui proses wawancara bersama narasumber, sedangkan data sekunder didapatkan penulis melalui arsip-arsip Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sumber data yang diperoleh penulis dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dilakukan melalui teknik wawancara bersama Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Badan Pendapatan Daerah Jawa Timur serta Kepala Sub Bidang Anggaran I Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dilakukan langsung dalam menggali informasi bersama dengan sumber yang bersangkutan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dibagi menjadi dua permasalahan. Pertama, bagaimana target dan realisasi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Jawa Timur. Kedua, bagaimana kontribusi pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur.

Pembahasan

Penerimaan yang diperoleh dari hasil pemungutan pajak dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pemungutan pajaknya sesuai dengan *Official Assessment System*, yakni pemerintah memiliki peran untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pada sistem ini pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat ketetapan pajak untuk mengetahui besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Dalam sistem ini penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut merupakan penerimaan yang penting terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Timur, mengingat penerimaan keduanya merupakan yang tertinggi dari sektor pajak, sehingga keduanya memiliki peranan yang cukup penting dan krusial dalam mewujudkan pembangunan daerah serta meningkatkan fasilitas dan pelayanan umum untuk masyarakat.

Setiap tahunnya, pemerintah daerah selalu memiliki rencana pembangunan dan rencana anggaran yang akan dikeluarkan untuk memenuhi pembiayaan daerah, sehingga pemerintah daerah pasti telah memiliki daftar prioritas yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Pemerintah daerah juga mengerti kondisi daerahnya sendiri sehingga dalam perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran pasti telah menimbang-nimbang rencana tersebut dari berbagai sisi. Rencana yang dimiliki daerah setiap tahunnya memiliki pengaruh terhadap target yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Target yang ditetapkan setiap tahun harus dapat dipenuhi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dengan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan target penerimaan setiap

tahunnya oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa untuk kemudian direalisasikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Dalam pemenuhan target Pajak Kendaraan Bermotor, peran pemerintah dan masyarakat sangat penting. Bagaimana pemerintah memberikan fasilitas dan pelayanan yang memudahkan masyarakat sebagai wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini yang berkewenangan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur telah memberikan kemudahan dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dapat dilakukan di gerai minimarket, samsat keliling yang biasanya ada di tempat keramaian seperti pasar dan taman, serta samsat *corner* yang ada di pusat perbelanjaan. Kemudahan transaksi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur semata-mata untuk meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur juga harus memperhatikan program seperti sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak sehingga penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Jawa Timur bisa lebih maksimal, karena umumnya wajib pajak masih belum patuh dan menyadari akan pentingnya dan besarnya manfaat yang dapat diambil dari pemungutan pajak.

Tabel 1. Kontribusi Komponen Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2017 (dalam persen)

Komponen PAD	2013	2014	2015	2016	2017
Pajak Daerah	81,22%	79,75%	81,14%	80,75%	82,84%
1 PKB	33,65%	29,84%	31,89%	33,51%	34,00%

2	BBNKB	33,14%	28,15%	22,95%	23,46%	21,39%
3	PBBKB	14,16%	13,75%	14,29%	12,65%	12,17%
4	PAP	0,003%	0,22%	0,20%	0,21%	0,19%
5	Pajak Rokok	0%	7,80%	11,82%	10,92%	15,08%
	Retribusi Daerah	0,92%	1,03%	1,15%	0,85%	0,76%
	Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2,87%	2,37%	2,29%	2,30%	2,16%
	Lain-Lain PAD yang Sah	14,99%	16,85%	15,43%	16,11%	14,25%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur data diolah

Berdasarkan **Tabel 1**, pajak daerah menunjukkan kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah, pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan penyumbang terbesar bagi komponen pajak daerah. Selama tahun 2013 hingga 2017, pajak kendaraan bermotor berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah masing-masing sebesar 33,648%, 29,837%, 31,888%, 33,512%, dan 33,998%. Rata-rata kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah adalah 32,58%. Angka ini sangat baik jika dibandingkan dengan penerimaan dari komponen PAD lainnya. Begitu pula dengan bea balik nama kendaraan bermotor, penerimaannya memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi bea balik nama kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2013 hingga 2017

berturut-turut adalah 33,136%, 28,145%, 22,945%, 23,458%, dan 21,388%. Jika dihitung rata-ratanya, penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor ini berkontribusi sebesar 25,81% terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Kedua jenis pajak daerah ini merupakan yang paling potensial dalam meningkatkan penerimaan bagi daerah. Jika kedua jenis pajak daerah tersebut terus ditingkatkan penerimaannya, maka hal ini akan meningkatkan penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Tidak hanya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor saja, seluruh sektor pajak harus digali secara maksimal untuk meningkatkan penerimaan daerah. Jika penerimaannya baik, maka pengeluaran pemerintah, fasilitas dan pelayanan masyarakat, serta kebutuhan masyarakat Provinsi Jawa Timur akan dapat terpenuhi dengan baik.

Penutup

Target dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah ditetapkan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur, kemudian diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Provinsi Jawa Timur untuk direalisasikan. Upaya pemerintah daerah untuk merealisasikan target pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan berbagai program, seperti sosialisasi ke masyarakat, sekolah, perguruan tinggi, SAMSAT Keliling, SAMSAT Drive Thru, pembayaran pajak melalui gerai supermarket, E-Smart, dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk memberikan edukasi sekaligus memudahkan masyarakat untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini tentunya juga bertujuan untuk merealisasikan target yang telah ditetapkan.

Pengelolaan dana dari Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan dampak yang baik terhadap masyarakat ditengah era otonomi daerah, sehingga daerah memiliki wewenang penuh untuk memanfaatkan aset yang dimiliki daerah itu sendiri dan menggali sumber-sumber pendapatan yang ditujukan untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor memiliki kontribusi yang baik terhadap Pendapatan Asli Daerah. Kedua jenis pajak tersebut merupakan salah satu komponen Pendapatan Asli Daerah yang sangat potensial untuk terus digali. Keduanya diharapkan mampu untuk terus meningkatkan penerimaannya sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional berdasarkan otonomi daerah. Penerimaan dari kedua jenis pajak tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan pembangunan fisik maupun non fisik bagi Provinsi Jawa Timur, sehingga fasilitas, pelayanan, dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik.

Daftar Referensi

- Adisasmita, Rahardjo. *Pembiayaan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Damayanti, Theresia Woro dan Supramono. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi, 2005.
- Samudra, Azhari Aziz. *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Toding, Ronald Bua. "Analisis Potensi dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel dalam Meningkatkan

Pendapatan Asli Daerah Kota Palangkaraya." Jurnal vol.
4 no. 1, 2005.

Yani, Ahmad. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2002.

Bapak Budi Setijono, S.H., M.Si. Wawancara pada tanggal 9
Januari 2020

Ibu Devia Hestina Arinda, S.STP. Wawancara pada tanggal 9
Januari 2020

Ibu Yuni Arlini, S.E., MM. Wawancara pada tanggal 4 Februari
2020